

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1 Kondisi Geografis dan Administrasi Kota Semarang

Kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah, terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Secara geografis, kota ini memiliki letak yang sangat strategis karena berada di jalur pantai utara Jawa, yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya, dua kota terbesar di Indonesia. Garis pantai sepanjang 13,6 km membuat Semarang memiliki peran penting sebagai kota pelabuhan sejak zaman kolonial. Pelabuhan Tanjung Emas, yang menjadi pusat perdagangan dan distribusi, telah berkontribusi pada perkembangan ekonomi kota, tidak hanya di sektor perdagangan, tetapi juga pariwisata dan jasa. Kota ini berbatasan dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Demak di sebelah timur, dan Kabupaten Semarang di selatan.

Dari segi administratif, Kota Semarang dibagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan, yang tersebar di seluruh wilayah seluas 373,8 km². Kecamatan Semarang Tengah adalah pusat pemerintahan dan bisnis, di mana banyak kantor pemerintahan, gedung-gedung perkantoran, serta pusat perbelanjaan besar berada. Di kawasan ini juga terdapat Simpang Lima, alun-alun kota yang menjadi pusat aktivitas masyarakat dan ikon utama Semarang. Semarang Barat merupakan kawasan yang penting secara ekonomi karena di sinilah Bandara Internasional Ahmad Yani dan berbagai kawasan industri berada, yang mendukung pertumbuhan ekonomi kota. Kecamatan Gajahmungkur dan Candisari di bagian

selatan terkenal sebagai daerah perumahan yang berkembang pesat dan memiliki kawasan hijau yang lebih sejuk.

Gambar 2.1 Wilayah Administrasi Kota Semarang



Sumber : Badan Pusat Statistika Kota Semarang Tahun 2014.

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Semarang, 2014

Jumlah penduduk Kota Semarang mencapai sekitar 1,8 juta jiwa, dengan komposisi etnis yang beragam, seperti Jawa, Tionghoa, dan beberapa etnis lain yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Kehidupan masyarakatnya cukup dinamis, dengan perpaduan antara budaya tradisional Jawa dan pengaruh modern yang tercermin dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi. Ekonomi Semarang didukung oleh beberapa sektor utama, seperti perdagangan, jasa, manufaktur, dan pariwisata. Secara keseluruhan, Kota Semarang merupakan kota yang berkembang pesat dengan kondisi geografis dan administrasi yang kompleks.

Keanekaragaman topografinya memberikan tantangan tersendiri, terutama dalam hal pengelolaan bencana alam seperti banjir, namun juga memberikan

potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan infrastruktur. Sebagai pusat administrasi dan ekonomi di Jawa Tengah, Semarang memiliki peran vital dalam perekonomian regional maupun nasional, dan terus bertransformasi menjadi kota metropolitan yang modern dengan tetap mempertahankan kekayaan budaya nya.

2.1.2 Kondisi Sosial dan Ekonomi Kota Semarang

1. Pendidikan

Pendidikan memegang peran krusial dalam memajukan suatu bangsa, karena melalui pendidikan, sumber daya manusia yang berkualitas dapat dibentuk. Pendidikan berfungsi sebagai fondasi utama untuk menciptakan masyarakat yang mampu berinovasi dan berkontribusi secara positif dalam pembangunan negara. Dengan adanya sistem pendidikan yang baik, upaya pembangunan di berbagai sektor dapat terwujud secara efektif. Kota Semarang, sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, diharapkan dapat menjadi pusat unggulan dalam bidang pendidikan, Kota ini berpotensi besar untuk menjadi pusat pengembangan pendidikan menengah yang dapat melahirkan generasi penerus yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Kondisi dan gambaran umum mengenai sistem pendidikan di Kota Semarang dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Data Jumlah Sekolah di Kota Semarang

Jenjang Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
SD / Sederajat	327	269	596
SMP / Sederajat	47	177	224
SMA / Sederajat	18	87	105
SMK	12	77	89

Sumber: <http://referensi.data.kemdikbud.go.id/> diakses Oktober 2024

Kondisi pendidikan yang baik di Kota Semarang memberikan peluang besar untuk meningkatkan mutu melalui kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan organisasi non-pemerintah. Salah satu bentuk kerja sama ini adalah Program Sekolah Percontohan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Jawa Tengah bersama PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia). Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. Dengan sistem pendidikan yang sudah berjalan dengan baik, kolaborasi ini bisa dilakukan lebih efektif, sehingga program seperti pendidikan kesehatan reproduksi dapat diterapkan dengan lebih luas dan memberikan manfaat besar bagi para remaja di Semarang.

2. Ekonomi

Pembangunan di bidang ekonomi di Kota Semarang selama ini menjadi fokus utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pembangunan ekonomi tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan merata, baik secara material maupun spiritual, dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan ini juga memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan daerah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan, serta bertujuan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.

Pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi ini, yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000, merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan. Berdasarkan data tahun 2023, Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Semarang mencapai angka 5,79%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,73%. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

Kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang pada tahun 2023 berasal dari beberapa sektor utama, yakni industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Sektor-sektor ini memainkan peran penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu, PDRB per kapita Kota Semarang juga menunjukkan

peningkatan signifikan, mencapai 146,87 juta per tahun pada 2023, dibandingkan dengan 135,33 juta per tahun pada 2022. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang, mencerminkan keberhasilan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berfokus pada pengembangan potensi daerah secara optimal.

2.2 Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Semarang

Dinas Pendidikan Kota Semarang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang. Dinas Pendidikan Kota Semarang merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola, mengawasi, dan membina sektor pendidikan di wilayah Kota Semarang. Melalui beragam fungsi seperti perencanaan, pengembangan kurikulum, pelayanan publik, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Semarang mengelola berbagai jenjang pendidikan dari PAUD, SD, hingga SMP.

2.2.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Semarang

Berikut adalah visi misi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Visi :

Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang Bermutu, Berkeadilan dan Berkarakter.

Misi :

1. Meningkatkan tata kelola administrasi, kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta keuangan yang efektif dan efisien dalam pengelolaan kebijakan pendidikan berbasis profesionalisme dan pelayanan public
2. Mewujudkan ekosistem PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non-Formal yang kreatif, inovatif dan berkarakter
3. Meningkatkan kualitas PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non-Formal termasuk bagi siswa berkebutuhan khusus secara memadai
4. Meningkatkan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada tingkat PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non-Formal yang kreatif, inovatif dan berkarakter

2.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang

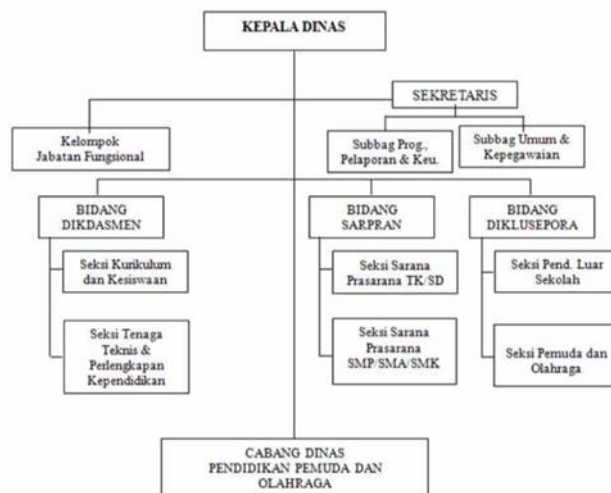
Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang :

1. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang
2. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, keuangan dan kepegawaian
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional yang meliputi bidang Pendidikan dasar, bidang pendidikan menengah dan bidang pendidikan luar sekolah
5. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya

6. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
7. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai lingkup tugasnya

2.2.3 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Semarang

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2024

Struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga yang ditunjukkan dalam bagan ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional dinas. Di bawah Kepala Dinas, terdapat Sekretaris yang membawahi dua subbagian, yaitu Subbag Program, Pelaporan, dan Keuangan, yang bertanggung jawab dalam merencanakan program kerja, membuat laporan, serta mengelola keuangan dinas; dan Subbag Umum dan

Kepegawaian, yang mengurus hal-hal terkait kepegawaian serta administrasi umum. Struktur organisasi ini juga terbagi ke dalam tiga bidang utama.

Pertama, Bidang Dikdasmen (Pendidikan Dasar dan Menengah), yang membawahi Seksi Kurikulum dan Kesiswaan, serta Seksi Tenaga Teknis dan Perlengkapan Kependidikan, yang fokus pada pengelolaan pendidikan dasar dan menengah, termasuk aspek kurikulum, tenaga pengajar, serta perlengkapan sekolah. Kedua, Bidang Sarpras (Sarana dan Prasarana), yang membawahi dua seksi, yaitu Seksi Sarana Prasarana TK/SD dan Seksi Sarana Prasarana SMP/SMA/SMK. Bidang ini bertanggung jawab atas penyediaan dan pengelolaan fasilitas pendidikan di tingkat TK hingga SMA/SMK. Ketiga, Bidang Diklusepora (Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga), yang terdiri dari Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Seksi Pemuda dan Olahraga. Bidang ini menangani kegiatan pendidikan non-formal serta pembinaan pemuda dan olahraga. Selain itu, terdapat Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga yang juga terlibat dalam pelaksanaan tugas dinas di berbagai wilayah. Struktur ini menunjukkan pembagian tugas yang jelas untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dan pembinaan pemuda serta olahraga secara efektif di daerah.

2.3 Gambaran Umum Organisasi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah

Didirikan pada tanggal 23 Desember 1957, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menjadi salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) tertua di Indonesia yang memelopori gerakan Keluarga Berencana. Pendirian PKBI diprakarsai oleh dr. R. Soeharto, dokter pribadi Presiden

Soekarno, bersama sekelompok tokoh masyarakat dan ahli kesehatan yang prihatin terhadap permasalahan kependudukan, tingginya angka kematian ibu, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga di Indonesia pada masa itu. Pada tahun 1950-an, gagasan tentang keluarga berencana menghadapi tantangan besar. Banyak masyarakat yang melihat upaya ini semata-mata sebagai pembatasan kelahiran, yang dianggap sebagai ancaman terhadap kemerdekaan pribadi mereka, terutama karena Indonesia baru saja merdeka.

Oleh karena itu, kegiatan PKBI pada awalnya sangat terbatas dan hanya diinisiasi oleh sekelompok kecil tenaga medis. Fokus awalnya lebih pada kesehatan ibu dan anak melalui ceramah-ceramah yang disampaikan oleh dokter serta tenaga medis. Meski materi yang disampaikan belum secara terang-terangan menyinggung program Keluarga Berencana (KB), fokus mereka adalah menciptakan keluarga yang sejahtera dengan memberikan nasihat perkawinan, membantu pasangan yang mengalami kemandulan, dan memberikan saran serta bantuan terkait penjarangan kehamilan.

Pada Kongres Nasional I PKBI di Jakarta, diambil keputusan penting untuk memperluas cakupan program KB dengan bekerja sama dengan instansi pemerintah. Kolaborasi ini mencapai titik penting ketika pada tahun 1967, Presiden Soeharto menandatangani Deklarasi Kependudukan Dunia, yang menegaskan pentingnya merencanakan jumlah anak dan menjarangkan kelahiran sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Tak lama setelah itu, pada 11 Oktober 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan Surat Keputusan yang membentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional, yang kini dikenal sebagai Badan

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dengan program-program PKBI yang diadopsi oleh pemerintah.

Keberhasilan PKBI dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan perempuan dan reproduksi membuka jalan bagi masyarakat untuk melihat KB dalam perspektif yang lebih luas, yakni kesehatan reproduksi secara keseluruhan. Kerja keras ini pun mendapatkan pengakuan internasional. Pada tahun 1969, PKBI berhasil menjadi anggota penuh dari International Planned Parenthood Federation (IPPF), sebuah federasi internasional yang beranggotakan 184 negara dan bergerak dalam memperjuangkan hak-hak seksual dan kesehatan reproduksi. Menghadapi tantangan di masa kini, PKBI menyatakan bahwa pengembangan program-programnya kini berlandaskan pada pendekatan berbasis hak, yang sensitif terhadap gender, dan fokus pada kualitas pelayanan serta kepedulian terhadap kelompok miskin dan marginal. Semboyan "berjuang untuk pemenuhan hak-hak seksual dan kesehatan reproduksi" mencerminkan komitmen PKBI dalam memperjuangkan hak setiap individu untuk mendapatkan akses terhadap kesehatan reproduksi yang berkualitas.

Selama lebih dari lima dekade, PKBI berkembang hingga mencakup 26 provinsi dan 249 kabupaten/kota di Indonesia. Tantangan utama yang dihadapi adalah mempertahankan semangat inovasi di tengah perubahan masyarakat. Di Jawa Tengah, PKBI berawal dari PKBI Semarang (1963) dan PKBI Kodya Surakarta (1966), hingga resmi berdiri pada 22 Februari 1969. Pada 1970-an, PKBI mengembangkan Program Pendidikan Masyarakat dengan berbagai kegiatan, seperti KPKB, MAVU, dan media tradisional. Program MAVU berhasil memasyarakatkan KB hingga diadopsi BKKBN menjadi MUPEN KB pada 1976.

Memasuki 1980, PKBI Jawa Tengah mulai mengembangkan kebijakan “back to clinic.”

Beberapa kegiatan yang berkembang pada saat itu mencakup program vasektomi, program remaja, serta program integrasi lainnya seperti pemberdayaan perempuan dan pelayanan anak melalui Bina Anaprasa. Salah satu keberhasilan yang patut diapresiasi dari PKBI Jawa Tengah adalah kemampuannya dalam menarik minat kaum pria untuk menjalani vasektomi, berkat penemuan metode Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) oleh Prof. dr. Untung Praptohardjo. Keberhasilan lain yang signifikan dari PKBI Jawa Tengah adalah pencapaian akreditasi A pada tahun 2014, karena berhasil memenuhi 10 Prinsip dan Standar Keanggotaan IPPF. Hingga saat ini, PKBI Jawa Tengah telah tersebar di 28 kabupaten/kota, terus melanjutkan perjuangannya untuk meningkatkan kesehatan reproduksi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

2.3.1 Visi dan Misi PKBI Jawa Tengah

Visi : Terwujudnya keluarga dan masyarakat Indonesia yang bertanggung jawab dan inklusif.

Misi :

- Memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang bertanggung jawab.
- Membangun gerakan remaja yang inklusif.
- Memberikan Pelayanan Kesehatan Seksual Dan Reproduksi Secara Komprehensif, Profesional Dan Inklusif.
- Mempengaruhi Dan Memperkuat Para Pengambil Kebijakan Untuk Menghormati, Melindungi, Dan Memenuhi HKSR.

- Mengembangkan Organisasi yang professional untuk mencapai kemandirian dan keberlanjutan.

2.3.2 Program Pusat Informasi dan Layanan Remaja (PILAR) PKBI Jawa Tengah

Gambar 2.3 Perkumpulan Anggota Pilar



Sumber: PKBI Jawa Tengah (2023)

PKBI bertujuan mewujudkan keluarga bertanggung jawab sebagai pilar kesejahteraan masyarakat. Keluarga yang bertanggung jawab mampu memenuhi kewajiban dalam kelahiran, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anggotanya. Untuk mencapai visi ini, PKBI Jawa Tengah mengembangkan Program Kesehatan Reproduksi dan Seksual pada Remaja melalui Pusat Informasi dan Layanan Remaja (PILAR), yang memberikan edukasi serta layanan kesehatan reproduksi bagi remaja..

PILAR didirikan pada tanggal 18 Maret 1998 oleh PKBI Jawa Tengah sebagai respons atas kebutuhan mendesak untuk memberikan perhatian lebih terhadap populasi remaja. Keputusan untuk memfokuskan program ini kepada

remaja didasarkan pada fakta bahwa remaja berjumlah sekitar 36% dari total populasi penduduk Indonesia, dan seringkali mereka tidak mendapatkan perhatian yang memadai dalam hal akses terhadap informasi yang relevan dengan kebutuhan psikologis dan kesehatan reproduksi mereka. Fakta menunjukkan bahwa remaja sering kali tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk memperoleh informasi dan layanan kesehatan reproduksi secara bebas, yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi psikologis mereka.

Berdasarkan permasalahan tersebut, PILAR merasa penting untuk memberikan perhatian khusus kepada kelompok remaja dengan menyusun dan mengimplementasikan program-program yang secara aktif melibatkan mereka. Sasaran utama dari program PILAR adalah remaja berusia 10 hingga 24 tahun, kelompok usia yang rentan karena rendahnya akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi. Program ini menyasar remaja yang berada di berbagai jenis pendidikan, baik formal, informal, maupun non-formal, serta remaja dari kelompok marjinal yang seringkali menghadapi hambatan lebih besar dalam mengakses layanan ini. Secara keseluruhan, tujuan dari Program PILAR adalah untuk meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab remaja terhadap kesehatan seksual dan reproduksi mereka.

Salah satu fokus utama program tersebut adalah untuk mengurangi penularan Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS, serta mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta dengan melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) agar dapat mendukung remaja dalam proses ini. Dengan cara ini, PILAR berharap dapat menciptakan

lingkungan yang lebih kondusif bagi remaja untuk bertanggung jawab atas perilaku seksual mereka, baik dalam konteks pribadi maupun sosial.

- Visi:
Remaja yang bertanggung jawab
- Misi :
Memberikan informasi kepada remaja mengenai kesehatan reproduksi sehingga remaja dapat bertanggung jawab atas perilaku seksual baik pribadi maupun sosial.
- Tujuan:
Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab remaja terhadap kesehatan seksual dan reproduksi untuk mengurangi penularan IMS, HIV-AIDS, serta mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dengan meningkatkan pengetahuan remaja dan dukungan stakeholder.

2.3.3 Program SETARA

Program SETARA (Semangat Dunia Remaja) merupakan salah satu inisiatif dari Pilar PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) Daerah Jawa Tengah. Program ini berfokus pada pendidikan hak kesehatan seksual dan reproduksi remaja, khususnya bagi siswa SMP di wilayah Semarang. Tujuan utama program ini adalah meningkatkan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab untuk menghindari perilaku berisiko.

Sasaran Program Program SETARA dirancang untuk siswa usia 12–15 tahun di beberapa sekolah. Sebelum pelaksanaan program, kesadaran dan

pemahaman siswa dan guru di sekolah tentang kesehatan seksual dan reproduksi relatif rendah. Program ini juga mencakup pelatihan untuk guru Bimbingan Konseling (BK) agar mereka dapat menjadi fasilitator yang menyampaikan materi program secara kreatif dan komprehensif.

Program SETARA dilaksanakan melalui pendekatan yang komprehensif dan berbasis kolaborasi. Pilar PKBI bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, sekolah, dan orang tua siswa, untuk memastikan kelancaran program. Beberapa strategi yang digunakan dalam pelaksanaan program ini adalah:

- **Pelatihan Guru BK**

Guru dilatih untuk menjadi fasilitator dalam menyampaikan modul SETARA, sehingga mereka mampu menyampaikan materi secara kreatif dan komprehensif.

- **Pendekatan Interaktif**

Materi disampaikan melalui metode yang interaktif dan menyenangkan, seperti diskusi kelompok, permainan, dan simulasi, untuk meningkatkan partisipasi siswa.

- **Pemetaan Wilayah**

Pilar melakukan adaptasi dengan mempelajari kondisi sosial dan budaya sekolah mitra sebelum pelaksanaan program, untuk memastikan materi dapat diterima dengan baik.

- **Kerja Sama dengan Stakeholder**

Pilar menjalin komunikasi aktif dengan berbagai pihak, termasuk orang tua siswa, untuk memastikan dukungan terhadap program.